

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sleman

Menurut Peraturan Bupati Sleman No 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan. BKAD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja BKAD, perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan, pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang.

VISI

Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera,

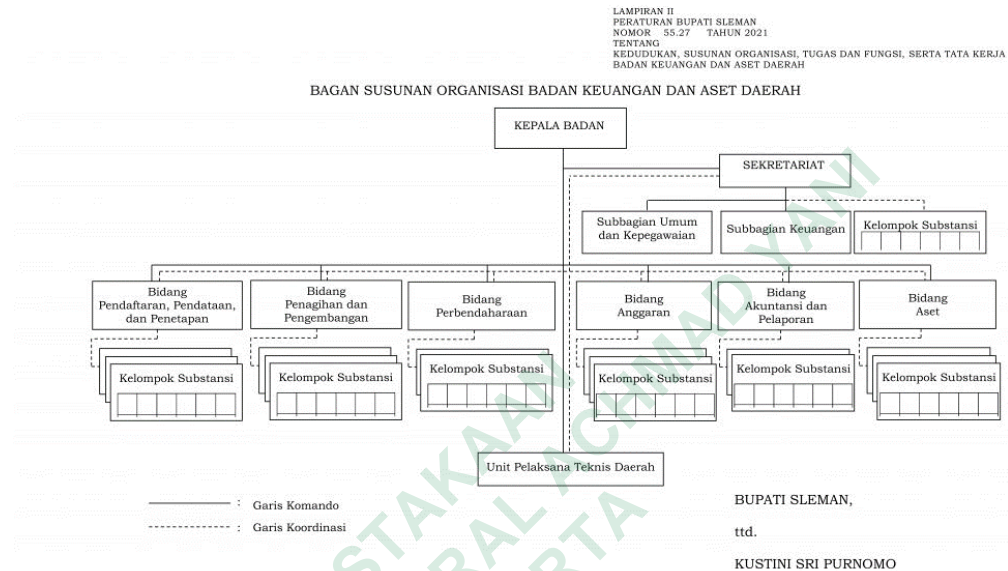
Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan Dan Memiliki Jiwa Gotong

Royong

MISI

Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dengan Dukungan
Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Berikut susunan organisasi badan keuangan dan aset daerah
kabupaten sleman



Gambar 4.1
Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman 2023

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Kuesioner dikirimkan kepada 46 responden dan dikembalikan oleh 41 responden dengan menggunakan data penelitian sebagai panduan.

Berikut ciri-ciri kuesioner dan informasi deskriptifnya:

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	46
2	Kuesioner yang kembali	41

3	Kuesioner yang tidak kembali	5
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	0

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

Dengan mengunjungi BKAD Sleman dan memantau sejumlah responden mengisi kuesioner, peneliti menyebarkannya. Peneliti juga mengingatkan anggota tim pengumpul data untuk mengisi kuesioner melalui komunikasi dengan mereka. kemudian dikumpulkan hingga 41 survei dari audiens.

4.3 Karakteristik Responden

1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Terdapat dua kategori partisipan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah total partisipan adalah 41, seperti pada tabel bawah ini:

Tabel 4.2

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki-laki	18	44%
2	Perempuan	23	56%
Jumlah		41	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa lebih dari 56% pegawai BKAD Sleman yang bekerja saat ini adalah perempuan.

2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti tidak melakukan pembagian kelompok berdasarkan usia dari total 41 responden yang

berpartisipasi. Karakteristik para responden dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Presentase (%)
25-30 tahun	20	49%
31-35 tahun	8	19%
36-40 tahun	5	12%
41-45 tahun	3	7%
46-50 tahun	2	5%
51-55 tahun	3	8%
Jumlah	41	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa sejumlah besar responden berada dalam rentang usia produktif, yang mengidentifikasi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memahami penerapan SAP, PI, dan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa responden memiliki keterampilan dalam menyusun laporan secara efektif dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel berikut menunjukkan pengelompokan jabatan berdasarkan temuan peneliti:

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

Nama Bidang	Frekuensi	Presentase(%)
Bidang Analisis Keuangan	5	12%
Bidang Subbag Keuangan	4	10%
Bidang Analisis Perbendaharaan	4	10%
Subbag Pengelolaan Dana	4	10%
Subbag Anggaran	7	17%
Subbag Perencanaan	5	12%
Bidang Pengadministrasian	4	10%
Subbag Umpeg	3	7%
Penatalaksanaan Keuangan	1	2%
Subbag Akuntansi	4	10%
Jumlah	41	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui pegawai terbanyak adalah sub bidang anggaran sebanyak 17%.

4.4 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Sebelum digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dengan mengkontraskan variabel turunan, validitas kuesioner diperiksa. nilai yang bervariasi dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas

Variabel	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson	N=41, α =5%	
	Correlation		
Akuntansi Sektor Publik	0,537	0,308	Valid
	0,37	0,308	Valid
	0,516	0,308	Valid
	0,432	0,308	Valid
	0,571	0,308	Valid
	0,621	0,308	Valid
	0,591	0,308	Valid
Pengawasan Internal	0,567	0,308	Valid
	0,736	0,308	Valid
	0,719	0,308	Valid
	0,65	0,308	Valid
	0,614	0,308	Valid
	0,618	0,308	Valid
	0,571	0,308	Valid
	0,519	0,308	Valid
0,32	0,308	Valid	
Kualitas Laporan Keuangan	0,718	0,308	Valid
	0,681	0,308	Valid
	0,872	0,308	Valid
	0,789	0,308	Valid
	0,616	0,308	Valid
	0,721	0,308	Valid
	0,722	0,308	Valid
	0,704	0,308	Valid
	0,783	0,308	Valid
	0,766	0,308	Valid
	0,67	0,308	Valid
	0,67	0,308	Valid
0,771	0,308	Valid	
	0,486	0,308	Valid

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,567	0,308	Valid
	0,68	0,308	Valid
	0,395	0,308	Valid
	0,513	0,308	Valid
	0,632	0,308	Valid
	0,545	0,308	Valid
	0,68	0,308	Valid
	0,618	0,308	Valid
	0,649	0,308	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa hasil pengujian validitas keseluruhan pernyataan yang terkait dengan variabel akuntansi sektor publik (X1), pengawasan internal (X2), kualitas laporan keuangan (X3), dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) menunjukkan bahwa rhitung lebih besar daripada rtabel, dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.005. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang telah digunakan dalam kuesioner penelitian ini memiliki validitas yang tinggi dan dapat diartikan sebagai instrumen yang efektif untuk mengumpulkan data.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang mencerminkan indikator dari suatu variabel atau komposisi tertentu. Dalam pengukuran reliabilitas, variabel atau konstruk dianggap reliabel apabila nilai *Cronbacj Alpha* > 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang dapat diterima secara statistik.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
	0,6		
Akuntansi Sektor Publik	0,6	0,751	Reliabel
Pengawasan Internal	0,6	0,78	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,6	0,925	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,6	0,766	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diamati bahwa variabel akuntansi sektor publik, pengawasan internal, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dianggap reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang memadai.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dalam kontes model regresi, variabel terikat bebas memiliki distribusi yang normal. Dalam pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, digunakan pendekatan yang valid dan efektif terutama pada sampeal yang berjumlah kecil. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal
- 2) Jika signifikansi $> 0,05$, maka dapat dianggap bahwa data memiliki distribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas BKAD Sleman:

Tabel 4.7

Uji Normalitas

Standar Normalitas	Asymp Sig	Keterangan
0,05	0,2	Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Data dapat disimpulkan terdistribusi normal karena asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ diketahui dari tabel diatas.

b. Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas menentukan apakah model regresi dengan benar mengidentifikasi korelasi antara variabel independen, uji multikoloniaritas digunakan. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Pengamatan variabel nilai toleransi atau faktor inflasi (VIF) digunakan untuk menentukan apakah ada gejala multikoloniaritas:

- 1) Jika nilai VIF < 10 atau nilai toleransi $> 0,10$, maka hal ini menunjukkan ketiadaan multikoloniaritas.
- 2) Jika nilai VIF > 10 atau nilai toleransi $< 0,10$, maka nilai ini mengindikasikan adanya multikoloniaritas.

Hasil uji multikoloniaritas tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Uji Multikoloniaritas

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntansi Sektor Publik	0,515	1,941	Tidak ada multikoloniaritas
Pengawasan Internal	0,510	1,962	Tidak ada multikoloniaritas
Kualitas Laporan Keuangan	0,667	1,498	Tidak ada multikoloniaritas

Data: Diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa multikolinieritas tidak terjadi karena variabel Akuntansi Sektor Publik mendapat nilai tolerance $0,515 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,941 < 10$. Untuk mencegah terjadinya multikolinearitas maka variabel pengendalian intern diberi nilai tolerance $0,510 > 0,10$ dan nilai VIF $1,96 < 10$. Untuk memastikan tidak adanya tanda-tanda multikolinearitas maka variabel kualitas laporan keuangan diberi nilai tolerance $0,667 > 0,10$ dan nilai VIF $1,498 < 10$.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	t	Sig.	Keterangan
ASP	0,354	0,725	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PI	0,764	0,449	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KLK	1,651	0,107	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikan variabel ASP sebesar 0,725, PI sebesar 0,449, dan KLK 0,107 hasil tersebut lebih besar 0,05 sehingga dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh ASP (X1), PI (X2), dan KLK (X3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) digunakan regresi linier berganda. Berikut persamaan regresi linier berganda:

Tabel 4.10
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	12,171	6,040
Akuntansi sektor publik	-0,156	0,252
Pengawasan Internal	0,581	0,189
Kualitas Laporan Keuangan	0,212	0,101

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,171 - 0,156 + 0,581 + 0,212 + e$$

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b0 = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien regresi berganda

X1 = ASP

X2 = PI

X3 = Kualitas Laporan Keuangan

e = Standar error

Dengan nilai konstanta 12,171, serta koefisien untuk variabel akuntansi sektor publik sebesar -0,156, pengawasan internal 0,581, dan koefisien untuk variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,212, maka persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α) = 12,171

Nilai konstanta sebesar 12,171 mengindikasikan bahwa nilai akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan adalah 12,171. Maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 12,171.

b. Koefisien akuntansi sektor publik = -0,156

Pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bersifat negatif. Ini menandakan adanya hubungan yang berlawanan antara kedua variabel. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,156 dan akan turun sebesar 0,156 jika akuntansi sektor publik diperluas

sebesar satu satuan implementasi. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Koefisien pengawasan internal = 0,581

Pengendalian internal mempunyai dampak positif terhadap bagaimana lembaga pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang baik antara kedua variabel. Pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,581 bila diintegrasikan ke dalam unit-unit akuntabilitas instansi pemerintah. Koefisien positif menunjukkan bahwa pengendalian internal dan akuntabilitas instansi pemerintah berkorelasi positif.

d. Pengaruh kualitas laporan keuangan = 0,212

Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang baik antara kedua variabel. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 0,212 ketika kualitas pelaporan keuangan naik sebesar satu satuan dari akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Koefisien positif menunjukkan bahwa pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah berkorelasi positif.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t (parsial)

Tujuan uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. Uji t menunjukkan bagaimana pengaruh masing-masing faktor—ASP, PI, dan Kualitas Laporan Keuangan—menjelaskan variasi AKIP. Tabel berikut menunjukkan hasil uji t:

Tabel 4.11

Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	2,015	0,051	
ASP	-0,617	0,541	Tidak berpengaruh signifikan
PI	3,069	0,004	Berpengaruh signifikan
KLK	2,090	0,044	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji t di atas dapat diketahui nilai t_{tabel} yang diperoleh pada tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) sebesar 2,026.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:

1. ASP memiliki nilai t_{hitung} dan t_{tabel} $-0,617 < 2,026$ maka tidak berpengaruh yang signifikan antara X_1 dan Y , demikian nilai signifikan $0,541 > 0,05$ sehingga variabel SAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Dengan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar $3,069 > 2,026$ dan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ maka PI berdampak besar terhadap bagaimana akuntabilitas kinerja entitas pemerintah.

3. KLIK mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terlihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,044 serta t_{hitung} dan t_{tabel} masing-masing sebesar $2,090 > 2,026$ dan $2,090 > 2,026$.

b. Uji f (Simultan)

Tujuan dari uji simultan adalah untuk memastikan apakah setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara sama atau tidak. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian simultan:

Tabel 4.12

Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	256,571	3	85,524	10,063	.000 ^b
	Residual	314,453	37	8,499		
	Total	571,024	40			

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 2,85 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan hasil perbandingan nilai signifikan sebesar 0,000 dan 0,05 untuk uji f maka dapat disimpulkan bahwa variabel ASP, PI, dan Kualitas Laporan Keuangan semuanya mempengaruhi AKIP secara simultan atau bersama-sama.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat diukur dengan koefisien determinasi (R^2). Tabel *Adjusted R Square*

pada hasil pengelolaan data menunjukkan nilai koefisien determinasi. Tabel di bawah ini menunjukkan temuan determinasi penelitian:

Tabel 4.13
Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	0,449	0,405	2,91526

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Dengan merujuk pada tabel yang disediakan, koefisien determinasi (R²) memiliki nilai sebesar 0,405 atau 40,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ASP, PI, dan Kualitas Laporan Keuangan hanya berdampak pada 40,5% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun sisanya sebesar 59,5% harus dijelaskan oleh unsur penyebab lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan terkait ASP, PI, dan KLK.

1. Pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, penerapan ASP tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Kabupaten Sleman, karena hasil t hitung akuntansi sektor publik sebesar $-0,617 < 2,026$ dan nilai signifikan $0,541 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Akuntansi Sektor Publik

(X₁) tidak berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Salamah, (2020), dan Rezeki (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Pengawasan Internal pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan temuan percobaan, penggunaan PI secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah BKAD di Kabupaten Sleman., karena hasil t hitung akuntansi sektor publik sebesar $3,069 > 2,026$ t tabel dan nilai signifikan $0,04 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Pengawasan Internal (X₂) berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tadjudinsyah (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian yang dilakukan Salamah (2020) juga menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena pengawasan internal membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.

BKAD Kabupaten Sleman memiliki pengawasan internal yang baik, hal tersebut diketahui bahwa responden cenderung

menilai bahwa tempat mereka bekerja memiliki pengawasan internal yang baik terutama pada tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan pengawasa internal yang baik. Artinya bahwa semakin baik pengawasan internal maka cenderung meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah.

3. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan, terbukti bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel kualitas laporan keuangan (X_3) $0,044 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,090 > 2,026 t_{tabel}$ menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Sleman, karena t_{hitung} lebih t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hikmawati (2022) yang menunjukkan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badang Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jember, yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Laporan keuangan yang mendukung pemerintah daerah telah digunakan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Sebagai ukuran akuntabilitas, laporan keuangan yang menjadi landasan pengukuran kinerja suatu instansi harus mampu memberikan informasi yang

dapat dipercaya. Karena pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk mengambil keputusan guna mengoptimalkan pengelolaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka laporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada uji F hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ASP, PI, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Kabupaten Sleman. Semakin meningkat akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Sleman.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmawati (2022) yang menunjukkan hasil uji simultan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian penelitian yang dilakukan Ikrami (2021) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.